



JURNAL

YURIDIS

ANALISA FENOMENA HUKUM SEBAGAI AKTUALISASI TRADISI ILMIAH

Vol. 6 No. 2 Desember 2019

KOMPETENSI DPD RI DALAM MENGEMBAN AMANAH UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA
RIANDA DIRKARESHZA

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
VIVI ARIYANTI

PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA
ANIFATUL KIFTIYAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
**SULASTRI
SATINO
YULIANA YULI W**

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGUNAKAN PANAH WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)
**MOHAMAD RUSDIYANTO U. PULUHULAWA
JUFRYANTO PULUHULAWA
MOH. FAHRURROZIE HIDAYATULLAH NUR MUSA**

STUDI KOMPARISI PENDAFATRAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK
**SITI NURUL INTAN
WARDANI WARDANI RIZKIANTI**

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANAU
**NIRWAN JUNUS
KARLIN ZAKARIA MAMU**

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYIDIKAN
PERKARA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)
GIGIH RENDRA



JURNAL YURIDIS

VOL. 6

NO. 2

Hlm. 1-181

Jakarta, Desember 2019

ISSN 1963 4458

DAFTAR ISI
Jurnal Yuridis
Volume 6 Nomor 2 Desember 2019

Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara Rianda Dirkareshza	1-32
Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Vivi Ariyanti	33-54
Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia Anifatul Kiftiyah	55-72
Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sulastri Satino Yuliana Yuli W	73-92
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa Jufryanto Puluhulawa Moh. Fahrurrozie Hidayatullah Nur Musa	93-117
Studi Komparasi Pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Bogor dan Kota Depok Siti Nurul Intan Wardani Wardani Rizkianti	118-135
Kebijakan Penataan dan Pengaturan Kawasan Danau Nirwan Junus Karlin Zakaria Mamu	136-156
Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Gigih Rendra	157-181